

Pembantaian Massal Timor Timur Dan Rekonsiliasi Hubungan Indonesia – Timor Leste (1975 - 2002)

Yudha Pratama Karjoko, Nur'aeni Marta, M. Hasmi Yanuardi

Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum,
Universitas Negeri Jakarta

abuhamzah292@gmail.com, nuraeni@unj.ac.id, mhasmiyanuardi@unj.ac.id

Abstract : *The end of the Sukarno government in 1966 led to changes in various sides, one of which was the pro-western perspective applied by the Soeharto government. Stabilization of relations with the United States brought Indonesia to be further away from the left-minded ideology that was once upheld by the 'Orde Lama' government. Liberalism adopted by makes Indoensia one of the shields in dealing with communist influences in Southeast Asia. In the case of Timor Leste, under the pretext of counteracting communist influence, Indonesia sent troops in the Seroja Operation shortly after the country claimed independence from the Portuguese. In its development, Timor Leste (which later became East Timor) became a conflict area for more than twenty years. The massacre alternately was carried out by ABRI dan Fretilin, hundreds of thousands of lives were lost and most of them came from civilians, not armed groups. Over time, Indonesia's position is increasingly difficult because East Timor continues the resistance to fight and overshadow by sanctions for human rights violations. The domestic crisis at the end of the 'Orde Baru' era slowly weakened Indonesia's control over East Timor that brought East Timor to the referendum and gained full independence in 2002.*

Keywords : *east timor, timor leste, indonesia, conflict*

Abstraksi : Berakhirnya pemerintahan Soekarno di tahun 1966 menyebabkan perubahan-perubahan di berbagai sisi, salah satunya adalah cara pandang pro Barat yang diterapkan oleh pemerintahan Soeharto. Stabilisasi hubungan dengan Amerika Serikat membawa Indonesia semakin jauh dari ideologi berpaham kiri yang dulu pernah dijunjung oleh pemerintahan Orde Lama. Paham liberal yang diadopsi oleh Indonesia menjadikan Indonesia sebagai salah satu tameng dalam menghadapi pengaruh komunis di Asia Tenggara. Dalam kasus Timor Leste, dengan dalih menangkal pengaruh komunis, Indonesia mengirim pasukan dalam Operasi Seroja sesaat setelah negara tersebut mengklaim kemerdekaan dari Portugis. Dalam perkembangannya, Timor Leste (yang kemudian menjadi Timor Timur) menjadi wilayah konflik selama lebih dari dua puluh tahun. Pembantaian silih berganti dilakukan oleh ABRI maupun Fretilin, ratusan ribu nyawa melayang dan sebagian besarnya justru berasal dari warga sipil, bukan kelompok bersenjata. Seiring berjalannya waktu, posisi Indonesia semakin sulit karena Timor Timur terus melakukan perlawanan dan dibayang-bayangi oleh sanksi pelanggaran HAM. Krisis dalam negeri di akhir era Orde Baru perlahan memperlemah kontrol Indonesia atas Timor Timur yang membawa Timor Timur kepada referendum dan memperoleh kemerdekaan penuh di tahun 2002.

Kata Kunci : timor timur, timor leste, indonesia, konflik

PENDAHULUAN

Hubungan luar negeri Indonesia dengan negara lain dipenuhi oleh berbagai dinamika. Indonesia digolongkan sebagai negara dunia ketiga, sehingga berada di tengah dua kekuatan besar yaitu Blok Barat yang berhaluan liberal-kapitalis dan Blok Timur yang berhaluan komunis-sosialis. Untuk itu, Indonesia memiliki satu cara pandang yaitu dikenal dengan nama Politik Luar Negeri Bebas Aktif, suatu manifesto politik luar negeri Indonesia yang tidak berafiliasi dengan salah satu blok dan aktif dalam menjaga perdamaian dunia. Wujud nyata dari manifesto politik tersebut adalah dengan menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika di tahun 1955 dan Gerakan Non-Blok bersama Yugoslavia, India, Mesir, dan Ghana di tahun 1961. Indonesia berusaha menjaga netralitas di antara pengaruh dua blok besar, meskipun tidak sesuai dengan prakteknya.

Pada era Orde Lama (1945 – 1965), Indonesia cenderung condong ke kiri (Blok Timur). Setelah periode revolusi (1947 – 1949), Indonesia memandang dunia barat sebagai akar dari kolonialisme dan imperialisme, sehingga menjauhi dunia barat dalam praktek politik luar negeri. Sikap condong ke kiri juga dipengaruhi oleh perasaan senasib dengan negara-negara dunia ketiga lainnya, selain dipengaruhi juga oleh semangat anti-kolonialisme dan anti-imperialisme. Indonesia terbuka dengan paham sosialis, bahkan Presiden Soekarno sendiri merancang berbagai proyek yang bernapaskan semangat sosialisme seperti Nasakom (Nasionalis, Agama, Komunis), Poros Jakarta-Pyongyang-Peking, serta pesta olahraga GANEFO untuk menandingi Olimpiade. Terlepas dari pandangan Politik Luar Negeri Bebas Aktif dan keikutsertaannya dalam GNB, pada prakteknya Indonesia tidak benar-benar netral dalam kegiatan politik luar negerinya. Hal tersebut membuat dunia barat ‘gerah’, bahkan hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dapat dikatakan buruk pada masa Orde Lama.

Pasca berakhirnya Orde Lama sebagai dampak dari G30S/PKI, Indonesia segera melarang segala aktivitas yang berbau sosialisme dan komunisme. Hubungan luar negeri ditata kembali dan Orde Baru cenderung condong ke barat. Di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat khusus Amerika Serikat diperbaiki. Indonesia dijadikan sebagai

tameng Amerika Serikat di Asia Tenggara untuk menangkal pengaruh komunisme, terlebih setelah Vietnam Selatan jatuh ke tangan Vietnam Utara dan dipersatukan menjadi negara Vietnam yang berhaluan komunis.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah historis dengan pendekatan kualitatif serta teknik studi kepustakaan. Langkah-langkah yang pengumpulan data adalah melakukan analisis jurnal, artikel, dan buku yang berkaitan dengan tema serta topik yang dibahas. Pendekatan yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari sumber-sumber yang didapat yang kemudian disusun menjadi narasi secara akurat. Dalam metode ini, langkah-langkah yang dilakukan adalah identifikasi sumber-sumber yang relevan, evaluasi keandalan, keakuratan, dan keaslian sumber, mengolah informasi dari sumber, menginterpretasi isi sumber, dan diakhiri dengan penyusunan tulisan artikel historis. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi literatur, yaitu mengumpulkan sumber-sumber tertulis baik itu secara fisik atau yang tersedia secara *online* seperti buku, majalah, dan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Portugis pertama kali datang ke Pulau Timor pada tahun 1512 dan mulai melakukan ekspedisi militer di tahun 1642 dibawah kepemimpinan Francisco Fernandes. Pusat aktivitas Portugis adalah Lifau dan kekuatannya Topas, sebutan untuk dua keluarga pedagang yang kuat, Da Costa yang merupakan Portugis Yahudi dan Hornay yang berasal dari Belanda. Portugis memindahkan pusat aktivitasnya dari Lifau di tahun 1769 ke sebuah daerah yang dinamai sebagai Dili.

Wilayah Portugis di Timor sempat masuk ke dalam wilayah yuridiksi Portugis India sampai tahun 1844. Di tahun 1850, Portugis Timor dihapus dari yuridiksi Kegubernuran Macau dan dikembalikan ke wilayah yuridiksi Portugis India di tahun 1856. Di tahun 1863, status Dili berubah menjadi “kota” dan Timor Timur berada langsung dibawah pemerintahan Portugis di Lisbon. Setelah

statusnya dikembalikan ke dalam yuridiksi Macau di tahun 1866 sampai 1896, wilayah ini dikembalikan lagi ke Lisbon dan menjadi provinsi pada tahun 1909

Perlawanan Timor Timur terhadap Portugis dimulai pada tahun 1910 sampai tahun 1912. Wilayah Timor Timur sendiri tidak terlalu diperhatikan oleh Portugis dan hanya dipandang sebagai pos perdagangan yang terbengkalai. Investasi yang minim, kurangnya infrastruktur dibidang pendidikan dan kesehatan, serta menurunnya ekonomi menyebabkan pemberontakan dengan skala kecil di tahun 1919. Pulau Timor kemudian dijadikan sebagai tempat pengasingan bagi lawan politik yang sebagian besarnya adalah kelompok anarkis dan anarko-sindikalis. Di masa PD II, Portugal adalah pihak netral namun pulau ini dijadikan sebagai pangkalan militer Australia dan Belanda dalam menghambat invasi Jepang. Setelah PD II, pulau ini dikembalikan ke Portugis dan di tahun 1955, pulau ini dijadikan sebagai Provinsi Seberang Laut Portugis. Meski begitu, dapat dikatakan bahwa Portugis tidak mengurus provinsi ini dengan baik karena minimnya investasi di berbagai sektor kehidupan, bahkan hanya sedikit penduduk Timor Portugis yang bisa mengenyam pendidikan.

Situasi ini memunculkan semangat kemerdekaan bagi masyarakat Timor. Kesempatan untuk merdeka datang di tahun 1960 setelah Timor Portugis memperoleh hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai Wilayah Tanpa Pemerintahan Sendiri. Di tahun 1974, terjadi Revolusi Anyelir di Portugal yang berhasil menggulingkan pemerintahan diktator dan mengembalikan demokrasi. Sebagai dampaknya, Portugal semakin meninggalkan provinsi Timor Portugis. Pemerintahan baru di Lisbon kemudian menunjuk Mario Lemos Pires sebagai gubernur Timor Portugis (sekaligus menjadi gubernur terakhir nantinya) pada tanggal 18 November 1974. Setahun kemudian, perang saudara pecah di Timor antara Fretilin yang berhaluan kiri dan UDT (*Uniao Democratica Timorenses*).

Indonesia, di tahun 1960-an, tidak memiliki perhatian khusus terkait konflik di Timor Timur, terlebih karena pada masa itu Indonesia memiliki masalah yang lebih penting seperti Pembebasan Irian Barat dan Operasi Ganyang Malaysia. Terlebih, Sukarno menyatakan bahwa Indonesia tidak memiliki minat untuk memasukkan wilayah non-bekas jajahan Hindia Belanda ke dalam wilayahnya,

yang juga termasuk Timor. Perhatian ke masalah Timor baru muncul pada masa Orde Baru, yaitu dalam rentang tahun 1974 - 1975. Pemerintahan Soeharto menyadari adanya bahaya yang akan ditimbulkan oleh pengaruh Fretilin yang bersayap kiri. Selain itu, pembentukan negara yang berhaluan komunis di tengah-tengah wilayah Indonesia dikhawatirkan menimbulkan gerakan-gerakan separatis baru. Sebab lainnya adalah ucapan Perdana Menteri Australia, Gough Whitlam, terkait ancaman yang mungkin timbul jika Timor Portugis menjadi negara merdeka. Cara yang paling aman bagi Indonesia (dan juga untuk menekan pengaruh komunis di kawasan sekitar Indonesia) adalah dengan mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia.

Pemilu di Timor Portugis diselenggarakan pada tanggal 13 Maret 1975, dengan Fretilin dan UDT sebagai dua partai terbesar. Fretilin menginginkan sebuah negara merdeka penuh yang berhaluan komunis, sedangkan UDT menginginkan Timor untuk berkembang di bawah pemerintahan Portugis sampai siap secara mandiri untuk mengurus pemerintahan sendiri. Satu faksi lainnya adalah Apodeti (Associação Popular Democrática Timorese) yang menginginkan integrasi dengan Indonesia. Di tanggal 11 Agustus 1975, UDT melancarkan kudeta demi menekan pengaruh Fretilin, menyebabkan gubernur Mario Lemos melarikan diri dari Dili. Kudeta ini dipandang sebagai perang saudara di mata Indonesia, yang ternyata hanya membuat situasi semakin kacau. Pada 28 November 1975, Fretilin memproklamasikan kemerdekaan Timor Leste, dan meskipun tidak diakui oleh Indonesia, Australia, dan Portugal, negara ini diakui oleh negara-negara berhaluan kiri seperti Albania, Guinea, Guinea-Bissau, dan Mozambik. Sebagai tanggapan, Indonesia dengan UDT, Apodeti, dan faksi pro-integrasi merancang Deklarasi Balibo di Bali, bukan di Timor Portugis. Tanggal 7 Desember 1975, Indonesia melancarkan operasi militer yang dinamai Operasi Seroja. Operasi sepenuhnya didukung oleh Amerika Serikat, Australia, UDT, dan Apodeti. Mulai dari titik ini sampai tahun 1998, serangkaian pembantaian massal dilakukan dalam mengintegrasikan Timor Portugis ke dalam wilayah Indonesia.

Operasi Seroja di tahun 1975 sudah memakan korban yang cukup banyak, yaitu 35 korban tewas dari pihak Indonesia dan 122 korban tewas dari FALINTIL

(sayap militer Fretilin). Indonesia berhasil menguasai kota Baucau dan mengirimkan sekitar 10.000 - 15.000 tentara di tanggal 25 Desember. Bulan April 1976, Indonesia memiliki 35.000 tentara di Timor Timur, dan lebih banyak lagi di akhir tahun 1976 (dengan tambahan kira-kira 20.000 tentara). Jumlah yang tidak seimbang antara pasukan Indonesia dengan sayap militer Fretilin memaksa Fretilin untuk mundur ke daerah pegunungan dan melakukan perlawanan secara gerilya.

Operasi Seroja membawa dampak nyata secara langsung, cepat, dan masif. Korban jiwa yang berjatuhan sampai bulan Februari 1976 mencapai 60.000 orang di pihak Timor Timur, sebagaimana yang diklaim oleh Lopez da Cruz, seorang Timor yang pro-integrasi. Ironisnya, hampir semua dari korban jiwa tersebut adalah warga sipil. Di bulan November 1976, ada sekitar 200.000 korban jiwa yang jatuh di pihak Timor Timur. Dibandingkan dengan sayap militer Fretilin yang hanya berjumlah 20.000 orang, dapat dipastikan bahwa sebagian besar dari korban jiwa yang jatuh adalah warga sipil. Di tahun 1975, penduduk Timor Timur hanya berjumlah 680.000 jiwa, sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia melakukan genosida dalam rentang waktu 1975 - 1976 saja. Penggunaan bom napalm secara luas oleh pihak Indonesia juga dilaporkan oleh majalah Times pada 25 Desember 1979, menyebabkan kerusakan lahan secara masif dan memaksa warga Timor Timur untuk menyerah, meski sebagian besar dari mereka tetap dibunuh setelah menyerahkan diri. Organisasi Palang Merah Internasional pun juga dilarang untuk memasuki wilayah Timor Timur sampai 19 Oktober 1979, meski kemudian dilarang kembali dan baru dibolehkan pada tahun 1983. Menteri Luar Negeri Indonesia kala itu, Adam Malik, juga tidak mempermasalahkan tentang banyaknya korban jiwa yang berjatuhan selama 'proses integrasi'. Bahkan beliau secara gamblang menyebut, jika angka kematian mencapai 50.000 atau 80.000, itu adalah harga dari sebuah peperangan.

Indonesia juga mendirikan kamp konsentrasi mulai tahun 1976 untuk memisahkan warga sipil dari kelompok perlawanan Timor Timur, mengedukasi dan mengindoktrinasi mereka dengan nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Di tahun 1980, ada sekitar 150 kamp namun tidak diurus dengan benar sehingga kebanyakan dari warga sipil di dalam kamp meninggal karena penyakit, malnutrisi, dan kelaparan.

Kelangkaan bahan pangan juga terjadi di mulai tahun 1979, memperparah kelaparan dan penyebaran penyakit.

Mulai tahun 1979, banyak operasi militer yang dilancarkan oleh pihak militer Indonesia. Sementara Indonesia mengerahkan militer dengan persenjataan lengkap, kelompok FALINTIL melakukan perlawanan secara gerilya. Pihak Indonesia beberapa kali mengklaim bahwa FALINTIL telah kalah, namun Indonesia tetap menyiagakan sampai 35.000 tentara di Timor Timur. Beberapa pelanggaran HAM yang dilakukan antara lain adalah merekrut anak-anak secara massal untuk dijadikan tameng hidup dalam menghadapi FALINTIL (mulai Agustus 1981), berbagai pengeboman udara mulai 1983 sampai 1984, dan berbagai serangan lainnya mulai tahun 1986 sampai 1988. Pihak Indonesia dan Timor Timur sebenarnya sudah pernah mencapai gencatan senjata pada Maret 1983 antara Kolonel Purwanto dan Komandan Timor Xanana Gusmao, namun dirusak oleh pihak Indonesia pada bulan Agustus 1983.

Selain kasus di atas, Indonesia juga melakukan beberapa kejahatan lain seperti pembunuhan sipil yang termasuk dalam kejahatan perang. Di bulan September 1981, Indonesia membunuh sekitar 500 orang di Gereja St. Antonio di Laciuta dan 200-300 orang di desa Viqueque di tahun 1983. Di antara kasus-kasus tersebut, barangkali peristiwa tahun 1991 adalah peristiwa yang paling diingat baik itu oleh Indonesia maupun Timor Leste. Di bulan November 1991, sekitar 2500 orang berkumpul di Gereja Motael untuk pawai memperingati kematian Sebastiao Gomes, seorang mahasiswa yang dibunuh di gereja tersebut oleh polisi tiga minggu sebelumnya. Massa kemudian melakukan *long march* berkeliling kota sampai tiba di Pemakaman Santa Cruz. Di pemakaman ini, massa berdemonstrasi dengan damai sampai tiba-tiba ditembaki oleh militer Indonesia yang menyamar dengan pakaian sipil. Sekitar 900 orang menjadi korban, dengan korban tewas mencapai 270 orang, 250 orang hilang, dan sekitar 380 orang luka-luka. Peristiwa ini disaksikan oleh dua jurnalis asal Amerika Serikat, Amy Goodman dan Allan Nair, sedangkan direkam oleh Max Stahl, yang kemudian ditayangkan oleh *Yorkshire Television*. Peristiwa ini pertama kali ditayangkan di televisi pada bulan Januari 1992 dalam acara dokumenter *First Tuesday In Cold Blood : The Massacre of East Timor* oleh stasiun

televisi ITV di Inggris. Pihak Indonesia segera menanggapi peristiwa itu sebagai akibat dari kesalahpahaman antara demonstran dengan militer. Laporan mengenai peristiwa ini tersebar di seluruh dunia, membuat malu pemerintah Indonesia yang diikuti dengan gelombang protes dan kecaman dari berbagai pihak. Posisi Indonesia jadi semakin sulit setelah Pdt. Carlos Filipe Ximenes Belo dan Jose Ramos Horta mendapat hadiah Nobel Perdamaian di tahun 1996 atas usaha mereka untuk “mencari solusi terbaik bagi penyelesaian konflik di Timor Timur”.

Krisis ekonomi yang melanda Asia Tenggara tahun 1997 juga berdampak pada Indonesia. Hal tersebut menyebabkan jatuhnya pemerintahan Soeharto di tahun 1998 dan mengakhiri era Orde Baru. Pergantian era menuju Reformasi yang ditandai dengan transisi menuju keterbukaan juga berpengaruh terhadap hubungan Indonesia dengan Timor Timur. Sekalipun Orde Baru tidak pernah (dan tidak ingin) memberikan kemerdekaan untuk Timor Timur, perbincangan mengenai kemerdekaan untuk Timor Timur terus mencuat di sepanjang tahun 1998. Menanggapi hal tersebut, Menteri Luar Negeri Ali Alatas mengusulkan adanya pembentukan otonomi khusus bagi Timor Timur yang dia sebut “tidak akan memberikan apapun kecuali rasa sakit” bagi Indonesia, sedangkan Presiden Habibie, pada tanggal 8 Juni 1998, mengumumkan bahwa Indonesia akan menawarkan opsi otonomi khusus bagi Timor Timur. Di akhir tahun 1998, PM Australia John Howard mengusulkan agar Indonesia memberikan referendum selama satu dekade terhadap Timor Timur, yang kemudian ditanggapi oleh Presiden Habibie bahwa Indonesia telah melakukan “upaya kolonialisme” jika opsi tersebut diberikan. Pada akhirnya, Presiden Habibie memilih untuk melakukan referendum dalam tempo yang secepatnya terhadap Timor Timur.

Indonesia bersama dengan Portugal, di tanggal 5 Mei 1999, mengumumkan bahwa mereka setuju untuk melakukan pemungutan suara yang memungkinkan masyarakat Timor Timur untuk merdeka. Sebelum perjanjian antara kedua negara disepakati, kelompok pro-kemerdekaan dan pro-otonomi mulai berkampanye menyuarakan aspirasi mereka, namun kelompok pro-kemerdekaan dan paramiliternya justru melakukan serangkaian kekerasan terhadap mereka.

Paramiliter pro-kemerdekaan melakukan berbagai serangan di Liquica pada bulan April yang menewaskan puluhan orang. Bulan Mei 1999 sekelompok orang yang didampingi oleh tentara Indonesia menyerang orang-orang yang dicurigai tergabung dalam kelompok pro-kemerdekaan di desa Aitara, dan bulan Juni 1999 kantor UNAMET (*United Nations Mission in East Timor*) di Maliana diserang oleh sekelompok orang. Meski pemerintah Indonesia bersikeras bahwa mereka tidak bisa menghentikan kekerasan yang terjadi di Timor Timur, Ramos Horta mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Indonesia adalah menimbulkan kekacauan besar dan ketidakstabilan di Timor Timur sebelum mereka angkat kaki dari sana.

Pemungutan suara akan dilakukan tanggal 8 Agustus 1999, yang kemudian diundur ke tanggal 30 Agustus, dan dilakukan oleh UNAMET. Indonesia juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses pemungutan suara, dan meskipun hal ini dikhawatirkan banyak pihak, PBB yakin bahwa Indonesia tidak akan mengizinkan adanya pengamanan apapun kecuali jika itu dilakukan oleh pihak Indonesia. Sebelum hari dilaksanakannya pemungutan suara, pihak-pihak Indonesia, salah satunya Lopez da Cruz, mengancam bahwa akan terjadi “pertumpahan darah” jika mayoritas Timor Timur menolak otonomi. Ancaman kepada masyarakat Timor Timur terus berlanjut dan menjadi semakin banyak menjelang hari pemungutan suara. Pada akhirnya, ketika pemungutan suara dilakukan tanggal 30 Agustus 1999, suasana berlangsung secara tenang dan tertib. Sekitar 98% pemilih yang terdaftar menggunakan haknya dan tanggal 4 September 1999, Sekjen PBB Kofi Annan mengumumkan bahwa 75,6% masyarakat Timor Timur memilih kemerdekaan dibandingkan integrasi.

Beberapa jam setelah pengumuman hasil referendum, terjadi kerusuhan di Dili. Hal tersebut menyebabkan banyak jurnalis dan pengamat internasional melarikan diri dari kota itu, serta menyebabkan sebagian besar warga Timor Timur untuk melarikan diri ke pegunungan. Sekitar 24 orang tewas di hari itu di dalam gereja yang dibakar oleh sekelompok orang, dan keesokan harinya kantor Komite Palang Merah Internasional (*International Committee of the Red Cross*) dibakar sampai rata dengan tanah. Sekitar seribu orang lainnya tewas dibunuh di Suai, dan

berbagai pembantaian juga terjadi di tempat lain. PBB menarik hampir semua personilnya dari Dili, menyisakan empat orang relawan yang menolak untuk dievakuasi kecuali jika diizinkan untuk membawa pengungsi bersama dengan mereka. Indonesia dan sayap militernya juga memaksa 200.000 orang untuk pindah ke Timor Barat, ke sebuah kamp yang menurut Pengamat HAM Internasional dideskripsikan sebagai kamp yang menyedihkan. Sama seperti aksi-aksi sebelumnya, pemerintah Indonesia mengelak, bahkan Presiden Habibie mengatakan kepada delegasi PBB (yang datang pada tanggal 8 September 1999 bahwa pembantaian tersebut hanyalah sebuah kebohongan.

Serangkaian aksi pembantaian membuat marah berbagai pihak, khususnya Amerika Serikat dan Australia. Australia melalui Perdana Menteri John Howard melobi Sekjen PBB Kofi Annan dan Presiden AS Bill Clinton agar diizinkan untuk mengirim pasukan perdamaian ke Timor Timur. Pada tanggal 11 September, izin diberikan dan Presiden Habibie mulai menarik pasukan Indonesia dari Timor Timur per tanggal 12 September. Lebih lanjut, PBB melalui Resolusi 1264 mengirim pasukan perdamaian internasional untuk menjaga keamanan di Timor Timur, juga untuk mengawasi transisi kemerdekaan Timor Timur. Pasukan Internasional Timor Timur (*International Force East Timor/INTERFET*) masuk ke Dili pada tanggal 20 September 1999 dan pasukan Indonesia yang terakhir ditarik pada tanggal 31 Oktober 1999. Sempat ada pertikaian antara INTERFET dengan paramiliter pro-integrasi, namun keadaan berhasil diamankan kembali.

PBB kemudian mendirikan Administrasi Sementara PBB di Timor Timur (*United Nations Transitional Administration in East Timor/UNTAET*) pada akhir bulan Oktober 1999 dan mengambil alih administrasi wilayah tersebut selama dua tahun. Setelah itu, kekuasaan diserahkan kepada pemerintahan Timor Leste yang sah dan kemerdekaan dideklarasikan pada tanggal 20 Mei 2002 dengan Xanana Gusmao sebagai presiden pertamanya. Tanggal 27 September 2002, Timor Leste diterima sebagai anggota PBB ke-191.

KESIMPULAN

Serangkaian peristiwa yang terjadi di Timor Timur (Timor Leste) dari tahun 1974 sampai 1998 hingga kemerdekaannya di tahun 2002 adalah sedikit dari banyak sejarah kelam bangsa Indonesia. Atas dasar menghalau persebaran pengaruh komunis di perbatasan Indonesia dan pada umumnya di Asia Tenggara, Indonesia melancarkan Operasi Seroja dan serangkaian operasi lain untuk mengintegrasikan Timor Portugis menjadi bagian dari wilayah Indonesia. Upaya meredam kelompok komunis di Timor Timur sebagian besarnya justru menyasar warga sipil termasuk wanita dan anak-anak.

Selama 27 tahun, konflik berdarah di Timor Timur menyebabkan ratusan ribu korban jiwa yang sebagian besarnya, sayangnya, adalah orang-orang yang tidak bersalah. Peristiwa ini adalah konsekuensi dari kedekatan hubungan Indonesia dengan negara barat terutama Amerika Serikat dan Australia yang mendukung penuh operasi ini. Meski begitu, pada akhirnya negara-negara yang mendukung tindakan Indonesia di Timor Timur seperti mencuci tangannya sendiri di akhir era Orde Baru. Era Reformasi akhirnya membuka jalan bagi kemerdekaan Timor Timur dan meski referendum tetap diwarnai dengan aksi kekerasan, Timor Timur menjadi negara merdeka dan konflik pun berakhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Chomsky, N., Bouchier, D., Ham, K. P. P., Kammen, D., & McDonald, H. (2006). Masters of terror: Indonesia's military and violence in East Timor.
- Cribb, R. (2002). From total people's defence to massacre: Explaining Indonesian military violence in East Timor. *Roots of violence in Indonesia*, 227-241.
- Dunn, J. (2012). Genocide in east timor. *Centuries of Genocide*, 278-315.
- Earle, L. (2023). Santa Cruz massacre and the politics of remembering. *Green Left Weekly*, (1394), 16-16.
- Jackson, M. G. (2001). Something must be done? Genocidal chaos and world responses to mass murder in East Timor between 1975 and 1999. *International Journal of Politics and Ethics*, 1(1), 45-72
- Nevins, J. (2005). A not-so-distant horror: Mass violence in East Timor.

- Nugroho, A. S. Historiographical Critique Balibo Film: Historical Reconstruction Disintegration of East Timor from Australia Media Views. *Resources Development toward Civil Society Based on Local Wisdom* Volume, 153.
- Wahyuni, T. S., & Setiawan, A. (2023). Memory of the Seroja Struggle: Memories and the Challenges of Life After Military Operations 1978–1998. *Trajectories of Memory: Excavating the Past in Indonesia*, 137-150.